

Cite this: *J.SST*, Vol 4 (1):  
58-63, 2024

Received Date:  
14 September 2024  
Accepted Date:  
28 September 2024

Keywords:  
*MIS, Effective*

Kata kunci:  
SIM, Efektif

DOI:  
<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>  
(contoh)

## Analisis Efektifitas Mekanisme Pencairan Anggaran Berbasis Sistem Informasi dan Teknologi pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

*Analysis of the Effectiveness of Information and Technology-Based Budget Disbursement Mechanisms in the General and Financial Sections of the Regional Secretariat of North Penajam Paser Regency*

Mahani<sup>1\*</sup>; Abdul Samad Arief<sup>2</sup>; Mujahid<sup>3</sup>

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

\*Email: [mahanihani07@gmail.com](mailto:mahanihani07@gmail.com); [abdulsamad@unifa.ac.id](mailto:abdulsamad@unifa.ac.id); (Email institusi, [pascasarjana@unifa.ac.id](mailto:pascasarjana@unifa.ac.id))

**Abstract.** *This study aims to determine and analyze how the mechanism and effectiveness of budget disbursement based on information systems and technology in the general and financial parts of the Regional Secretariat of North Penajam Paser Regency. The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data used in this study consists of two types of data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and observations. After being studied, the next step is data reduction, unit preparation, categorization and the last is data interpretation. The implementation of information technology-based disbursement of funds has been running effectively. Obstacles or obstacles obtained in disbursing the budget are that the disbursement process is sometimes hampered because the server is often maintained and even errors and the issuance of SPD takes longer.*

**Keywords:** *MIS, Effective*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme dan efektifitas pencairan anggaran berbasis sistem informasi dan teknologi pada bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Pelaksanaan pencairan dana berbasis teknologi informasi telah berjalan dengan efektif. Kendala atau hambatan yang diperoleh dalam pencairan anggaran yaitu proses pencairan kadang terhambat karena server yang sering *maintenance* bahkan *error* dan penerbitan SPD membutuhkan waktu lebih lama.

**Kata kunci:** SIM, Efektif

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyamakan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010).

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang semakin pesat beriringan dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Adanya perkembangan teknologi tersebut menuntut adanya globalisasi disetiap negara. Hal tersebut menyebabkan adanya daya saing disetiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Pembayaran beban atas dana APBN memiliki dua mekanisme yaitu pencairan dana melalui pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan (UP).

Dalam melakukan pencairan dana anggaran baik pencairan dana langsung maupun pencairan dana uang persediaan harus dilakukan seefisien mungkin agar pembiayaan-pembiayaan dalam rangka melancarkan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Perbendaharaan memiliki fungsi perencanaan kas yang baik untuk pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan pencairan sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan/organisasi. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Harahap, 2010).

teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis. Akuntansi sebagai bisnis, sistem bahasa dan informasi, harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang akan disampaikan kepada pengguna laporan keuangan (Sarokolaei, 2012).

Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan sebuah instansi yang berupaya memenuhi tuntutan zaman dan teknologi dengan kaitannya dengan pelaporan dan pencairan anggaran. Pada kantor Sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan sistem SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi tersebut merupakan

fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme kinerja pencairan dana anggaran berbasis sistem informasi dan teknologi pada bagian umum dan keuangan yang ada di Kantor sekretariat Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sampel penelitian yaitu berupa wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada bagian umum dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebanyak 162 orang dan informan penelitian sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan dalam pencairan keuangan pada bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa tahap dalam pencairan dana yaitu:

1. Membuat Permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh BUD. Jika SPD sudah ada, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
2. Jenis SPP yang diajukan tergantung kebutuhan SKPD. SPP terbagi menjadi empat macam yaitu (1) Uang Persediaan (SPP-UP); (2) Ganti Uang (SPP-GU); (3) Tambah Uang (SPP-TU), (4) Langsung (SPP-LS).
3. Jika SPP telah diverifikasi dan diotorisasi tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
4. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pencairan dana sendiri dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005 yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap

Mekanisme pencairan keuangan yang dilakukan oleh bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum telah sesuai dengan aturan dan SOP yang ada dan telah berbasis teknologi informasi. Meskipun telah melaksanakan mekanisme pencairan keuangan secara baik sesuai dengan SOP yang ada, namun nyatanya masih terdapat beberapa kendala-kendala. Berdasarkan keterangan mengenai kendala-kendala yang ada dalam pencairan keuangan di bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diketahui bahwasanya pencairan yang kadang terhambat yang disebabkan oleh server yang sering maintenance bahkan error dan penerbitan SPD yang membutuhkan cukup waktu menjadi kendala yang paling sering ditemui. Olehnya itu, para informan menyampaikan beberapa harapannya terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada dipemerintahan.

### **Mekanisme Pencairan Anggaran di bagian umum dan keuangan Penajam Paser Utara**

Menurut Andrayani (2014), Pencairan dana adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pencairan dana adalah:

- Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
- Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melengkapi sarana dan prasarana pembangunan.
- Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembangunan baik di pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (kemendagri.goid).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (kemendagri.goid).

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan (kemendagri.goid).

SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan dalam pencairan keuangan pada bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Mekanisme dalam Pencairan dana di bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ada beberapa tahap yaitu:

- Membuat Permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh BUD.
- Jika SPD sudah ada, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
- Jenis SPP yang diajukan tergantung kebutuhan SKPD. SPP terbagi menjadi empat macam yaitu (1)Uang Persediaan (SPP-UP); (2) Ganti Uang (SPP-GU); (3) Tambah Uang (SPP-TU), (4) Langsung (SPPLS).
- Jika SPP telah diverifikasi dan diotorisasi tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran atau kuasa penerima anggaran.
- SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Menurut BPKD (2015) SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUN. Waktu

pelaksanaan penerbitan SP2D yaitu, diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM (Bakari et al., 2022).

Pencairan dana sendiri dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005 yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 05/2010 Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM digunakan sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di wilayah atau daerah yang telah ditentukan untuk mencairkan dana APBN. Adapun macam-macam SPM terdiri dari:

- SPM belanja pegawai yang di dalam SPM belanja pegawai ada beberapa jenis SPM lagi yaitu:
  - SPM gaji induk
  - SPM gaji susulan
  - SPM Kekurangan gaji
  - SPM uang duka wafat
  - SPM persekot gaji
  - SPM terusan
- SPM belanja barang dan lain- lain antara lain:
  - SPM langsung
  - SPM uang persediaan
  - SPM tambahan uang persediaan
  - SPM penggantian uang persediaan
  - SPM penggantian uang persediaan nihil.

Mekanisme pencairan keuangan yang dilakukan oleh bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum telah sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam compliance theory, yang mana teori ini dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan organisasi yang berusaha untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada.

### **Efektivitas Pencairan Anggaran di bagian umum dan keuangan Penajam Paser Utara**

Berdasarkan penelitian pelaksanaan pencairan dana berbasis teknologi telah berjalan efektif. Kendala atau hambatan yang diperoleh berdasarkan penelitian bahwa pencairan anggaran yang kadang terhambat yang disebabkan oleh server yang sering maintenance bahkan error dan penerbitan SPD yang membutuhkan waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia sebagai pengelola atau pengguna aplikasi telah mahir karena melewati tahapan pelatihan. Hal tersebut sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan yaitu Bustan (2007) yang menyatakan sumberdaya manusia yang mengikuti diklat, dan sarana komputer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penerbitan surat perintah pencairan dana. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan Kusumaningsih (2016) yang menyatakan Kualitas Sumber daya Manusia dan teknologi berpengaruh terhadap kualitas SP2D (Kadmaer, 2020).

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kapoh et al, (2015) bahwa peran SDM seperti pendidikan dan pelatihan juga membentuk kapasitas bendahara pengeluaran dalam mengefektifkan pencairan dana (Kadmaer, 2020).

## SIMPULAN

Mekanisme pencairan keuangan yang dilakukan oleh oleh bagian umum dan keuangan sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu dengan membuat permohonan SPD (Surat Penyedia Dana) yang diterbitkan oleh BUD, lalu jika SPD sudah ada dilanjutkan dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Jika SPP telah diverifikasi dan diotorisasi tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran atau kuasa penerima anggaran. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pelaksanaan pencairan dana berbasis teknologi informasi telah berjalan dengan efektif. Kendala atau hambatan yang diperoleh dalam pencairan anggaran yaitu proses pencairan kadang terhambat karena server yang sering maintenance bahkan error dan penerbitan SPD yang membutuhkan waktu lebih lama

## REFERENSI

- 1 Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2016. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat
- 2 Andriana, M., Panjaitan, R., & Sumarlin, T. 2021. Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Dengan Metode R&D. *Evolusi: Jurnal Sains Dan Manajemen*, 9(2): 49-62.
- 3 Anita, K., Irwinsyah. 2019. Aplikasi Akuntansi Anggaran Belanja dan Realisasi Pada Madrasah Aliyah Al Hikmah Bandar Lampung. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 2(1): 9-14
- 4 Arta, M., Herlin, T. Irene, P. 2011. Sistem Informasi Budgeting untuk Perguruan Tinggi. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) UPN Veteran Yogyakarta.
- 5 Baig, A. H. and Gururajan, R. 2011. Preliminary Study to Investigation the Determinants that Effect IS/IT Outsourcing. *Journal of Information and Communication Technology Research*, 1(2): 48-54
- 6 Daniarsa, I. P. 2021. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Manfaat Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada LPD Se Kecamatan Pupuan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1): 346-365.
- 7 Harahap, Sofyan Syafri. 2010. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- 8 Indah Bakari, R., Karamoy, H., dan Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2): 941–948.
- 9 Indra Bastian. 2013. Sistem Akuntansi Sektor Publik, edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- 10 Kadmaer, E. A. (2020). Analisis Efektifitas Pencairan Dana Pada Di Pemerintah Daerah: Kajian Empiris Di Provinsi Papua Barat. In | *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah (Vol. 5, Issue 1)*.
- 11 Kusnendi, M. S. 2014. Konsep Dasar Sistem Informasi. Konsep Dasar Sistem Informasi.
- 12 Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- 13 Mala, E., Rochman, S., & Rachmad, A. 2016. Sistem Informasi Anggaran Belanja. In *Jurnal Ilmiah Nero* 2(2):83 89.
- 14 Munandar. 2001. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: UI Nafarin, 2000. Anggaran Perusahaan Jakarta Salemba Empat.
- 15 Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- 16 Nafarin, M. 2009. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat. Nafarin, M. 2014. Penganggaran Perusahaan, Edisi ke 3. Salemba Empat: Jakarta
- 17 Nugroho, Y. P., Basuki, B., & Fanani, Z. 2018. Analisis Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) dalam Proses Pencairan Dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1): 67–80.
- 18 Nurul Zuriyah. Metodologi penelitian sosial dan pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- 19 Palata, L. 2011. Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana dan Tingkat Realisasi Anggaran Pada KPPN Poso. *Jurnal Ekomen*, 11(1): 1-12.
- 20 R. A. Supriyono, S.U, 2000, Akuntansi Manajemen, Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta